

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERAN STAKEHOLDER
PENGELOLAAN SUB DAS NGRANCAH BERKELANJUTAN
(STUDI KASUS DI SUB DAS NGRANCAH – KABUPATEN KULONPROGO)**

*Identification and Analysis The Role of Stakeholders
in Sustainable Ngrancah Sub Watershed Management
(Case Study in Ngrancah Sub Watershed –Kulon Progo Regency)*

**Marcus Octavianus Susatyo¹, Djoko Marsono², Ambar Kusumandari², dan
Nunuk Supriyanto²**

¹Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ²
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

ABSTRACT

Watershed management is part of sustainable national development and its implementation have to synergistically with other development sectors. Coordination among stakeholders is fundamental framework that must be done to achieve the objectives and targets of sustainable watershed management. Ngrancah Sub watershed is the catchment area of Sermo Dam. The area of Ngrancah Sub Watershed is almost 2110 hectares. The existence of vital object, Sermo Dam, signalled the need for Ngrancah Sub Watershed management in a sustainable way. In this regard , need to identification and analysis the role of stakeholders in sustainable Ngrancah Sub Watershed management. The objectives of this research : (1) to identify stakehoders involved in Ngrancah Sub Watershed management; (2) to analyse the role of each stakeholder in Ngrancah Sub Watershed management. Stage analysis : identify all stakeholder involved/interest/influenced in Ngrancah Sub Watershed managment; classify stakeholders based on to their role in operational of Ngrancah Sub Watershed management into 3 categories (Primary, secondary and tertiary); identify each category of stakeholder according to : (1) Characteristic of social and economic status , the structure of the organization , duties and responsibilities;(2) problems : needs, interst, objectives; (3) potency : resources owned, knowledge, experiences; (4) Involvement in the implementation of the program : beneficiary, support, resistence; each stakehoder would be examined, especially for “important” stakeholder in term of influence and the interests of their involvement in Ngrancah Sub Watershd management and its affecting the success of the program. What is meant by interest in here is how problems, needs and interest of stakeholders in line with watershed management. Result of stakehoders identification, there are 23 stakeholders involve in ngrancah sub watershed management which divided into 13 primary stakeholders, 3 secondary stakeholders, and 7 tertiary stakeholders. The success of sustainable management can be done by synergies among stakeholders. Regional Planning Office of Kulon Progo District (BAPPEDA) and Serayu Opak Progo Watershed Management Office become a leading sector in ngrancah sub watershed management.

Key Words : *Watershed, sustainable watershed management, stakeholder*

PENDAHULUAN

Daerah aliran sungai (DAS) sebagai suatu unit teritori merupakan tempat bagi sub sistem hidrologi untuk memproduksi air dan pada saat yang bersamaan sub sistem sosial ekonomi bekerja menghasilkan barang dan jasa (Fernandez, 1993). DAS kemudian memproduksi berbagai dampak sampingan dari aktifitas didalamnya seperti erosi, sedimentasi, banjir, kekeringan, penurunan produktivitas lahan, dan sebagainya (Hufschmidt 1996). Lebih lanjut disampaikan bahwa dampak sampingan yang tidak diinginkan ini apabila tidak ditangani akan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi ekologi suatu wilayah yang berdampak pada hilangnya pendapatan masyarakat dan selanjutnya mengganggu jalannya proses pembangunan. Pendekatan pengelolaan DAS menjadi relevan kembali setelah munculnya banyak bencana dan kerugian sebagai dampak pengelolaan DAS yang buruk.

Karakteristik, permasalahan dan tantangan yang berkembang di masing-masing DAS berbeda-beda, bahkan antar Sub DAS dalam satu DAS juga dapat berbeda. Keragaman karakteristik fisik dan sosial membawa konsekuensi pengelolaan daerah aliran sungai harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi yang ada agar DAS yang sehat dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Konsep berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan sangat multi-dimensi dan multi-interpretasi. Berkenaan dengan hal tersebut, para ahli sepakat untuk mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Fauzi, 2004).

Sebagai suatu ekosistem, segala aktifitas manusia yang dilakukan di dalam DAS akan memengaruhi keseimbangan ekosistem sehingga aktifitas manusia tersebut harus diatur dan dikendalikan. Aktiitas manusia dalam DAS sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelambagaan (*institutional arrangement*). Selama ini, ketidak-optimalan fungsi DAS disebabkan adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS. Masing-masing sektor mempunyai program kegiatan yang berbeda-beda, tidak jarang pula saling tumpang-tindih, bertentangan yang pada akhirnya menjadi kontra produktif bagi keberlanjutan pengelolaan DAS dan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan bagian pembangunan nasional berkelanjutan dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pengelolaan DAS berkelanjutan meliputi kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder

lainnya. Koordinasi diantara pelaku pengelolaan DAS berkelanjutan merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sub DAS Ngrancah merupakan daerah tangkapan air Waduk Sermo dengan luas wilayah sekitar 2110 Ha. Adanya obyek vital berupa waduk mengisyaratkan perlunya pengelolaan Sub DAS Ngrancah secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi dan analisis peran stakeholder pengelolaan Sub DAS Ngrancah Berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk : (1) mengidentifikasi stakeholder dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah, (2) menganalisis peran masing-masing stakeholder dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah berkelanjutan.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan dengan metode observasi/survey, wawancara dan studi pustaka/literature/produk hukum (pemerintah pusat dan daerah). Teknik yang akan digunakan untuk meng-identifikasi dan meng-analisis stakeholder dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan pembuatan daftar para pihak (stakeholder) yang terlibat atau tertarik dengan program pengelolaan Sub DAS Ngrancah berkelanjutan; peng-klasifikasi-an para pihak yang didasarkan pada keterlibatan dalam pelaksanaan operasional pengelolaan Sub DAS Ngrancah dan membagi/membedakan dalam kategori primer, sekunder, tersier.
2. Analisa peran, kepentingan dan pengaruh stakeholder. Menganalisis fungsi/peran stakeholder penting dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah; mengidentifikasi setiap stakeholder berdasarkan a) karakteristik status sosial dan ekonomi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, b) problem: kebutuhan, ketertarikan, tujuan, c) potensi: sumberdaya yang dimiliki, pengetahuan, pengalaman, d) keterlibatan dalam pelaksanaan program kegiatan: manfaat, dukungan, resistensi; mengelompokkan setiap stakeholder (terutama yang penting) dari sisi pengaruh (mempunyai kuasa/kekuatan) dan kepentingan dalam keterlibatan pengelolaan Sub DAS Ngrancah sehingga mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan program kegiatan. Stakeholder kemudian dikelompokkan/dipetakan sesuai matrik pada Gambar 1 berikut ini :

Tinggi	<p>A. Ketertarikan/kepentingan Tinggi (<i>high interest / importance</i>) dan pengaruh rendah (<i>low influence</i>)</p> <p>Stakeholder ini menghendaki adanya inisiatif untuk dilibatkan agar kepentingan mereka terlindungi</p>	<p>B. Kepentingan Tinggi (<i>high importances</i>) dan pengaruh tinggi (<i>high influence</i>)</p> <p>Stakeholder ini yang paling perlu dilibatkan untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program kegiatan</p>
Kepentingan	<p>D. Ketertarikan/kepentingan rendah (<i>Low Interest/importance</i>). Pengaruhnya rendah (<i>low influence</i>)</p> <p>Stakeholder tersebut perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program kegiatan</p>	<p>C. Ketertarikan/kepentingan rendah (<i>low interest/importance</i>), rendah (<i>low interest/importance</i>), pengaruhnya tinggi (<i>high influence</i>)</p> <p>Stakeholder tersebut dapat mempengaruhi dampak dari pelaksanaan program kegiatan</p>
Rendah	Pengaruh	Tinggi

Gambar 1. Matrik Stakeholder Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh (Friedman, 1983, Mandala Zeji dkk, 2013)

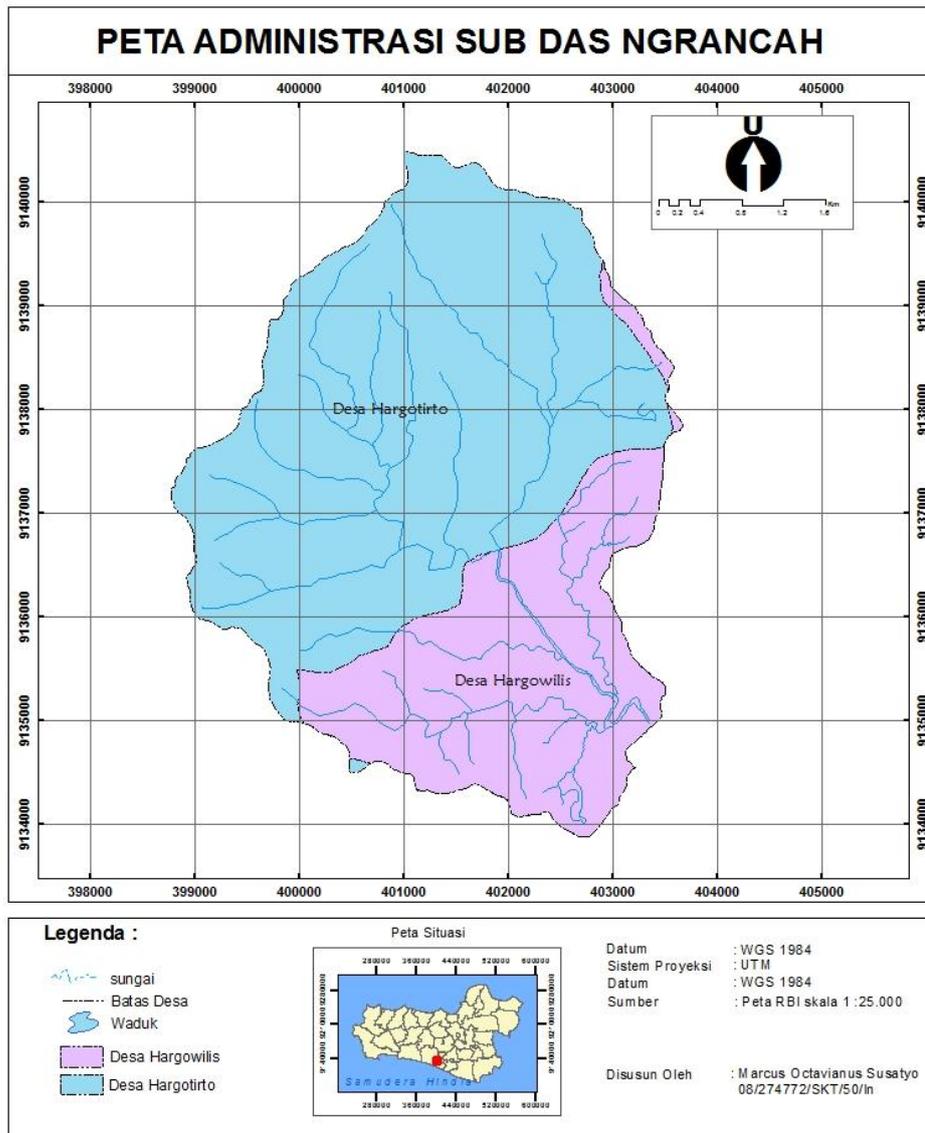
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah dan Permasalahan Sub DAS Ngrancah

Lokasi penelitian di Sub DAS Ngrancah, merupakan Sub DAS dari DAS Serang dimana DAS Serang secara geografis terletak pada 110°11'09" – 110°11'08" Bujur Timur dan 7°44'24" – 7°58'00" Lintang Selatan. Secara administrasi, Sub DAS Ngrancah berada di Kabupaten Kulon Progo dan wilayahnya meliputi satu wilayah kecamatan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di dalam DAS Ngrancah adalah petani, penggunaan lahan didominasi oleh kebun campur dan hanya sebagian kecil (sekitar 2 % dari luas Sub DAS Ngrancah) berupa kawasan hutan (Suaka Margawatwa Sermo). Sub DAS Ngrancah merupakan DAS yang rawan degradasi lahan dengan topografi yang cukup berat/terjal, dimana lebih dari 80% luas arealnya berada dalam kelas kelerengan agak curam (kelas kelerengan III/ kelerengan 15 – 25%) sampai dengan sangat curam (kelas kelerengan V/ kelerengan > 40%).

Sub DAS Ngrancah mempunyai fungsi yang penting antara lain sebagai pemasok Waduk Sermo melalui Sungai Ngrancah guna mendukung sistem jaringan irigasi Kalibawang,. Keberadaan Waduk Sermo dalam Sub DAS Ngrancah yang tidak terlalu luas merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan miniatur DAS sebagai lokasi

penelitian. Luasnya lahan kritis dan besarnya eros/sedimentasi mengancam keberlanjutan operasional Waduk Sermo. Besarnya sedimen yang masuk ke Waduk Sermo sebesar 95.371 m³ per tahun (Anonimus, 2012). Meskipun bertopografi yang cukup berat dan ancaman degradasi lahan yang cukup besar, potensi wisata di Sub DAS Ngrancah cukup bagus dan tinggal pengelolaannya perlu ditingkatkan. Dua potensi yang sudah cukup dikenal yaitu wisata Waduk Sermo dan Kalibaru, dan ada beberapa lagi yang masih dirintis oleh pemuda/masyarakat setempat seperti rencana obyek wisata Gunung Gajah dan Gunung Ijo.



Gambar 2. Peta Administrasi Sub DAS Ngrancah (Sumber : BPDAS SOP, diolah)

B. Identifikasi dan Klasifikasi Stakeholder

Pengelolaan Sub DAS Ngrancah melibatkan banyak pihak/stakeholder. Masing-masing pihak/stakeholder tersebut mempunyai peran dan kepentingan yang berbeda-beda terkait pengelolaan Sub DAS Ngrancah. Peranan dan kepentingan stakeholder tergantung pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk mengetahui stakeholder apa saja yang terlibat, berperan dan berkepentingan terhadap pengelolaan Sub DAS Ngrancah perlu dilakukan identifikasi para pihak serta menganalisa tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder tersebut. Secara garis besar para stakeholder dapat digolongkan ke dalam stakeholder dari unsur instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan LSM/organisasi non pemerintah. Sedangkan dari unsur pemerintah dibedakan dari unsur pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah DIY dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil identifikasi dan melihat gambaran/diskripsi wilayah dan permasalahan Sub DAS Ngrancah saat ini, parapihak/stakeholder yang terlibat, berperan dan berkepentingan terhadap pengelolaan Sub DAS Ngrancah antara lain : Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Sekda Kabupaten Kulon Progo, Bappeda Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas PU Kabupaten Kulon Progo, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Dinas Kebudayaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Kulon Progo), Pemerintah DIY (Sekda DIY, Bappeda DIY, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY/BKPH, Dinas Pekerjaan Umum DIY, Badan Lingkungan Hidup DIY, Dinas Pariwisata DIY), Pemerintah Pusat (Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Wilayah Sungai Progo Opak Serayu), LSM/organisasi non pemerintah (Forum DAS DIY, LSM), BUMD (PDAM), Perguruan Tinggi, Masyarakat/Kelompok Tani

Dalam kegiatan pengelolaan Sub DAS Ngrancah, masing-masing stakeholder tersebut mempunyai tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Klasifikasi stakeholder berdasarkan keterlibatannya dalam pelaksanaan pengelolaan Sub DAS Ngrancah dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Stakeholder dalam Pengelolaan Sub DAS Ngrancah

No	Stakeholder	Klasifikasi Stakeholder
1.	Bappeda Kabupaten Kulon Progo	Primer
2.	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon Progo	Primer
3.	Dinas PU Kabupaten Kulon Progo	Primer
4.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	Primer
5.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak	Primer
6.	Forum DAS DIY	Primer
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Primer
8.	Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo	Primer
9.	PDAM	Primer
10.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta	Sekunder
11.	Dinas Pendidikan	Tersier
12.	Masyarakat	Primer
13.	Dinas PU, Perumahan dan Energi Sumberdaya Munal DIY	Primer
14.	Aparat Desa	Primer
15.	Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo	Sekunder
16.	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo	Tersier
17.	Bappeda DIY	Primer
18.	Dinas Pariwisata DIY	Tersier
19.	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo	Tersier
20.	Sekda Kabupaten Kulon Progo	Tersier
21.	Sekda DIY	Tersier
22.	Perguruan Tinggi/Akademisi	Tersier
23.	Badan Lingkungan Hidup DIY	Sekunder

Berdasarkan identifikasi dan hasil klasifikasi diatas, terdapat 13 stakeholder primer, 3 stkeholder sekunder dan 7 stakeholder tersier. Kategori Stakeholder Primer (Utama): yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah para pihak yang tergantung pada sumber daya (resauces) atau jasa (service) yang terkait langsung dengan pelaksanaan program pengelolaan DAS atau yang paling banyak menerima dampak/manfaat dari program pengelolaan DAS. Kategori Sekunder: adalah para pihak yang menjadi perantara, mitra (partner) dalam proses pemberian jasa (service) atau bantuan kepada stakeholder utama. Kategori Tersier: adalah para pihak yang tidak terlibat atau terpengaruh langsung dalam pelaksanaan program pengelolaan DAS tetapi dapat mempengaruhi pihak lain dalam pengelolaan DAS yang dilaksanakan.

C. Analisis Peran, Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder

Berdasarkan peranan dan fungsinya dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah, secara garis besar stakeholder tersebut bisa dibedakan menjadi 2, yaitu peran dan fungsi informal maupun formal. Peran dan fungsi informal terdiri atas para pihak yang terlibat dalam penggunaan ruang dan sumberdaya alam dalam wilayah DAS, sedangkan peran dan fungsi

formal dalam hal ini Pemerintah. Kelompok formal yang diperankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/kota) selama ini dikenal dalam bentuk Kementerian, Balai dan Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD) Propinsi dan Kabupaten/Kota. Semenjak diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, secara ringkas pembagian urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3, antara lain :

1. Urusan pemerintahan absolute, merupakan urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi
2. Urusan pemerintahan konkuren, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan pelaksanaannya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sendiri dibedakan menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial), dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja; pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistic; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan). Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewenangan pemerintah pusat (kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) paling lama 2

(dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 baru saja diundangkan tanggal 2 Oktober 2014 dan pedoman/petunjuk/peraturan pelaksanaannya belum ada, maka untuk analisis peran stakeholder pengelolaan Sub DAS Ngrancah berkelanjutan masih berpedoman pada PP Nomor 38 Tahun 2007. Adapun peran/tupoksi stakeholder yang dianggap penting dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah adalah sebagai berikut :

1. Instansi Pusat di Daerah:

a. Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo

Selaku organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan DAS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo memiliki wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Propinsi Jawa Tengah dengan fungsi : penyusunan rencana pengelolaan DAS, penyusunan dan penyajian informasi DAS, pengembangan model pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan DAS, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

b. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta mempunyai wilayah kerja seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor :P.02/Menhut-II/2007 mempunyai tugas dan fungsi antara lain : penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan lindung; penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; pengendalian kebakaran hutan; promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;

pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak

BBWS merupakan unit pelaksana teknis bidang konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai yang berada dibawah. Bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Sumberdaya Air melalui direktur terkait (Permen Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2006 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Wilayah Sungai). Di wilayah Sub DAS Ngrancah terdapat BBWS Serayu Opak yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut : menyusun pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai, menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan perlin-dungan sumber air pada wilayah sungai, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, penyiapan rekomendasi teknis dalam penyiapan izin atas penyelesaian, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai, operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengelolaan sistem hidrologi, penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air, fasilitasi kegiatan, koordinasi pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai

2. SKPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi

Bertugas dan berperan dalam melaksanakan pembinaan teknis kepada Dinas/Instansi pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanaman, konservasi tanah dan pemeliharaan tanaman di wilayah administrasi masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam tahap prakondisi, melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut : komunikasi dan konsultasi secara berkala dengan Kementerian Kehutanan; koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, BPDAS, BPTH, BKSDA, BTN, Perum Perhutani, TNI dan POLRI setempat; melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota; melaksanakan pengawasan fungsional, berkoordinasi dengan lembaga pengawasan fungsional Departemen Kehutanan (Itjen Dephut), dan lembaga pengawasan fungsional Kabupaten/Kota (Bawasda Kab/Kota);

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi

BAPPEDA Propinsi mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dibidang perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA berfungsi : menyusun pola dasar pembangunan daerah Propinsi; menyusun program pembangunan daerah; menyusun rencana strategi Propinsi; melaksanakan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah Propinsi, instansi vertikal daerah Kabupaten/Kota dan Badan-Badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi bersama-sama dengan biro keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah Propinsi; mengkoordinasikan kegiatan kelembagaan peneliti dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan pembangunan di daerah; menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan yang bersinergis dan strategi terhadap pembangunan di daerah; melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian kegiatan yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; mengadakan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dalam skala lokal, nasional, regional dan internasional baik lembaga pemerintah maupun swasta/masyarakat; mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut; memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah; melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

c. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi

BLH Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Propinsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud BLH Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi : pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis operasional dibidang pengelolaan lingkungan hidup meliputi : analisis mengenai dampak lingkungan; pengendalian pencemaran dan pemulihan

Lingkungan; pelaksanaan pembinaan teknis fungsional dibidang pengelolaan lingkungan hidup; penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi, kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan evaluasi, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan dan umum.

3. SKPD Daerah Kabupaten

a. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten menyelenggarakan fungsi: pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan kehutanan; penyusunan program, rencana kegiatan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang teknis bidang kehutanan; pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh; pelaksanaan pengkajian Hukum dan Perundang-undangan di bidang Kehutanan; pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian perijinan; pengkoordinasian, fasilitasi, pelaksanaan, penerapan dan pengkajian teknologi kehutanan; pelaksanaan kegiatan planologi kehutanan dengan melakukan inventarisasi dan perpetaan; pelaksanaan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang produksi kehutanan terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan dan tata niaga hasil hutan; pelaksanaan pengawasan perlindungan hutan dan konservasi alam; pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial; pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air; pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; pelaksanaan evaluasi kegiatan; penyuluhan dan penyampaian laporan kegiatan.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

BAPPEDA Kabupaten mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten bertugas : menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah; menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup; menyusun perencanaan pemerintahan; menyusun perencanaan sosial budaya; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik; melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

c. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/kota berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang lingkungan hidup; pengendalian dampak lingkungan; pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara; pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir, laut dan danau; pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan biomassa; penanggulangan pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam; pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup; pengembangan perangkat ekonomi lingkungan; penerapan sistem manajemen lingkungan hidup, ecolabel, produksi benih dan teknologi berwawasan lingkungan; pelaksanaan kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup; pemberian pelayanan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan; pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan perlindungan atmosfer; penyediaan laboratorium lingkungan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup; pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan; penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

Peran serta, potensi dan keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokan Stakeholder Berdasarkan Karakteristik, Problem/Kebutuhan/
Ketertarikan, Potensi dan Keterlibatan dalam Program

No	Stakeholder	Karakteristik	Problem/ Kebutuhan/ Ketertarikan untuk Terlibat	Potensi	Keterlibatan dalam Program
A. Stakeholder Primer					
1	Bappeda	Mempunyai kewenangan merencanakan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, data dan informasi pembangunan, pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Berkemampuan mengkoordinasikan berbagai program kegiatan antar sektor di Sub DAS Ngrancah	Perencana pembangunan daerah
2	Dinas Pertanian dan Kehutanan	Berwenang dalam tugas pembantuan terkait bidang pertanian dan kehutanan	Keterbatasan dana sehingga mempengaruhi pencapaian program kegiatan	Mempunyai andil dalam memelihara/konservasi/ kelestarian sumberdaya hutan dan lahan	Pelaksana kegiatan dibidang pangan, kehutanan dan perkebunan
3	Dinas Pekerjaan Umum, (Dinas PUP-ESDM)	Berkewenangan di bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan energy sumberdaya mineral, dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Tugas utama, penataan ruang, 39energy dan sumberdaya mineral	Berkontribusi besar dalam pengelolaan DAS dan energy dan sumberdaya mineral	Pelaksana kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, energy, sumberdaya mineral
4	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Berwenang merumuskan kebijakan di bidang konservasi sumberdaya air, pendayagunaan air, dan pengendalian daya rusak air	Menjalankan tugas terkait langsung dengan pendayagunaan sumberdaya air	Berkemampuan merencanakan, mengkonstruksi, operasional dan pemeliharaan, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan dan pengendalian air	Perencana, pelaksana, dan fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai
5	Forum DAS	Organisasi terdiri dari para stakeholder dan dilegalisasi oleh preside, gubernur, bupati/wali kota, untuk peningkatan koordinasi	Fungsi kemudahan koordinasi pengelolaan DAS	Memberi masukan dan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan program pengelolaan DAS	Mitra dalam tahap pelaksana pekerjaan
6	Lembaga Swadaya Masyarakat	Aktif pendampingan/fasilitasi masyarakat dalam aktifitas program pengelolaan DAS	Keterbatasan keahlian dalam membuat perencanaan	Berpengalaman bekerjasama dengan masyarakat desa	Pendukung pelaksanaan program kegiatan
7	BPDAS Serayu Opak Progo	Mempunyai kemampuan dan kewenangan membuat rencana pengelolaan DAS	Keterbatasan/kesulitan pelaksanaan fungsi koordinasi dengan stakeholder pengelolaan DAS	Berkewenangan dan berpengalaman untuk membuat rencana pengelolaan DAS, menginformasikan	Sebagai koordinator pelaksana program pengelolaan DAS

No	Stakeholder	Karakteristik	Problem/ Kebutuhan/ Ketertarikan untuk Terlibat	Potensi	Keterlibatan dalam Program
				dan melakukan sosialisasi rencana, program dan kegiatan pengelolaan DAS, dan sebagai perwakilan wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah.	
8	Perusahaan Daerah Air Minum	Aktif dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih	Keterbatasan dana dalam pengelolaan air bersih	Penyedia dan pendistribusi air bersih	Produsen air bersih bagi warga
9	Masyarakat	Menerima manfaat langsung/tidak langsung dari program kegiatan pengelolaan DAS	Pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya	Kearifan local terkait konservasi sumberdaya hutan dan lahan	Penerima manfaat utama dan dampak dari adanya program kegiatan pengelolaan DAS
10	Aparat Desa	Berkewajiban membuat dalam pembangunan dan pengembangan desa	Kapasitas dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan desa yang berbasis pada rencana pengelolaan DAS masih kurang	Berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program di tingkat desa	Aktor perencana dan koordinator pelaksana program tingkat desa
B. Stakeholder Sekunder					
1	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta	Berwenang merumuskan kebijakan dalam bidang konservasi flora dan fauna terutama di kawasan konservasi	Berkontribusi dalam pengelolaan DAS mengingat adanya ancaman terhadap kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya	Kemampuan dalam hal pengelolaan sumberdaya hayati dan ekosistem	Pengelola dan koordinator teknis terkait sumberdaya hayati, ekosistem serta kawasan konservasi
2.	Kantor Lingkungan Hidup	Perumus kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup	Berkewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga sangat berkepentingan terhadap masalah-masalah lingkungan hidup	Berpengalaman dalam penilaian, pengawasan dan pengendalian permasalahan lingkungan hidup.	Pembina, pemantau, pengendali, pemulihan terkait bidang lingkungan hidup
C. Stakeholder Tersier					
1	Kantor Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Berkewenangan merumuskan kebijakan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian perikanan kehutanan	Turut berkontribusi dalam pengelolaan DAS meskipun tidak secara langsung	Kemampuan dalam memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan/penyampaian informasi	Sebagai pelaksana penyuluhan dan penyampaian informasi

No	Stakeholder	Karakteristik	Problem/ Kebutuhan/ Ketertarikan untuk Terlibat	Potensi	Keterlibatan dalam Program
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Perumusan kebijakan bidang kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga	Kepentingan menjamin kelestarian objek-objek wisata	Berkemampuan mengelola, mengembangkan, memasarkan daerah wisata dan kebudayaan sehingga memberikan alternative peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di luar sector pertanian/kehutanan	Tidak secara langsung; sebagai penyelenggara bidang kebudayaan, pengembangan pariwisata
3	Setda	Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah	Keterbatasan dalam menyusun rencana/kebijakan secara parsipatif	Kemampuan koordinasi terhadap seluruh stakeholder pengelolaan DAS	Perumus, koordinator, pemantau dan pengevaluasi kebijakan pemerintah daerah
4	Dinas Pendidikan	Merumuskan kebijakan di bidang pendidikan	Keterlibatan dalam pengelolaan DAS belum sepenuhnya sepanjang belum memasukkan konteks pengelolaan DAS dalam kurikulum,	Berkemampuan meningkatkan pemagaman masyarakat terkait pengelolaan DAS	Penyelenggara pendidikan baik formal maupun informal bagi masyarakat terkait lingkungan dan pengelolaan DAS
5	Perguruan Tinggi	Misi pendidikan dan riset	Keterbatasan dana, koordinasi dan kolaborasi	Berkompeten dalam studi, survey dan penelitian	Kolaborasi dan kerjasama dalam kegiatan studi/riset pengelolaan DAS

Analisis stakeholder pengelolaan Sub DAS Ngancah berkelanjutan berdasarkan pemetaan tingkat kepentingan dan pengaruh dapat dibedakan menjadi : 1) stakeholder dengan tingkat kepentingan dan kekuatan pengaruhnya yang tinggi (antara lain : Bappeda Kabupaten Kulon Progo; Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo; Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY; Forum DAS; Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo; masyarakat; aparat desa; Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten; Bappeda DIY; Sekda Kabupaten Kulon Progo; Sekda DIY; Badan Lingkungan Hidup DIY;

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo; Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak; Dinas PU, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral DIY) , 2) stakeholder dengan tingkat kepentingan tinggi dan kekuatan pengaruhnya yang rendah (antara lain : PDAM; Balai Konservasi Sumber Daya Alam; Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo; Dinas Pariwisata DIY) , 3) stakeholder dengan dengan tingkat kepentingan rendah tetapi kekuatan pengaruhnya tinggi (Lembaga Swadaya Masyarakat; Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo; Perguruan Tinggi) , 4) stakeholder dengan tingkat kepentingan dan kekuatan pengaruhnya yang rendah (antara lain Dinas Pendidikan). Berdasarkan pengelompokan stakeholder (karateristik, problem/bebutuhan/ ketertarikan, potensi dan keterlibatan dalam program) serta analisis peran, kepentingan dan pengaruh terhadap stakeholder yang dianggap penting dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah, Bappeda Kabupaten Kulon Progo dan BPDAS Serayu Opak Progo merupakan stakeholder kunci dalam kelancaran pelaksanaan pengelolaan Sub DAS Ngrancah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Identifikasi stakeholder terkait pengelolaan Sub DAS Ngrancah sangat perlu dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi dalam pengelolaan DAS, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran. Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder terdapat 23 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah yang terbagi ke dalam 13 stakeholder primer, 3 stakeholder sekunder dan 7 stakeholder tersier.

Untuk mensinergikan semua stakeholder dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah, disarankan perlu adanya leading sektor, BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo dan BPDAS Serayu Opak Progo bisa menjadi leading sektor dalam pengelolaan Sub DAS Ngrancah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- _____. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- _____. 2012. Keputusan Kepala BLH DIY No. 188/3008 tentang Rencana Strategis BLH DOY 2012 – 2017.

- _____. 2013. Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
- _____. 2013. Kecamatan Kokap dalam Angka tahun 2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
- _____. 2013. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, Badan Lingkungan Hidup, Daerah Istimewa Yogyakarta
- _____. 2013. Rencana Strategis Dinas PU, Perumahan dan ESDM Pemerintah DIY tahun 2012-2017, Dinas PU Perumahan dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta
- _____. 2014. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo Nomor.050.13/14/VIII/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo No. 050.13/06.A/2012/2012 tentang Rencana Strategis Bappeda Kulon Progo Tahun 2011 – 2016, Bappeda Kabupaten Kulon Progo.
- _____. 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Brown, K., Tompkins E., Edger, W.N., 2001. Trade-off Analysis for Participatory Coastal Zone Decision Making. ODG DEA, UEA Norwich, United Kingdom : Casserger
- Fauzi, A. dan Suzzy Anna. 2005. Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan. PT. Gramedia. Jakarta.
- Fernandez, E. 1993. Strategies for Strengthening Watershed Management in Tropical Mountain Areas. Kumpulan naskah pada Watershed Management, Torrent and Avalanche Control, Land Rehabilitation and Erosion Control.
- Friedman, John (1983). Planning in the Public Domain : From Knowledge to Action, New Jersey : Princeton University Press.
- Gonsalves J, et all (2005). Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management : A Resource book (glossary). International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development, Philipines.
- Hornby, A.S. 1995. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. C Jonathan & Kavanagh and M. Ashby. Oxford University Press, Oxford.
- Hufschmidt, M.M. 1986. A Conceptual Framework for Analysis of Watershed Management Activities, Strategies, Approaches and Systems in integrated Watershed Management. Conservation Guide 14. Roma.
- Mandala Zeji, dkk (2013). Urban Renewal Kawasan Prof Yohanes "Sagan Segan" Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Race, D and J. Miller. Training Manual : Social and Community Dimensions of ACTAR Projects Australian Center for International Agricultural Research-Institute for Land, Water, and Society of Charles S University, Australia.